

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Letaknya yang cukup strategis, karena diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta memiliki 2 samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Memiliki beribu-ribu pulau, bukan berarti setiap pulau memiliki kondisi alam yang sama. Hal ini membuat Indonesia kaya akan alam dan keindahan tersendiri disetiap pulaunya baik dari Sabang maupun sampai Merauke. Kekayaan alam ini dapat berupa sumber daya yang ada seperti sumber daya alam.

Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, Indonesia memiliki karakteristik geografis beragam baik secara tatanan tektonik, dinamika meteorologis dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Hal ini dikarenakan secara geologis terletak di antara lempeng Asia, Pasifik, Australia, serta terletak di cincin api gunung berapi yang masih aktif sebanyak 129 buah. Yang dapat mengakibatkan bencana alam berupa letusan gunung berapi dan gempa bumi. Di samping itu, terdapat 157 dari 497 kabupaten/ kota di Indonesia memiliki kerawanan tinggi diterjang tsunami (Purnama & Murdiyanto, 2013:184).

Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah

air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi. Dan banyak bencana yang berasal dari manusianya sendiri seperti ledakan industri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan pengertian bencana. Bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Bencana alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam (Hardiyanto & Darmansyah, 2019:31).

Salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan keadaan atau peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena meningkatnya volume air pada daerah tersebut. Banjir dapat diakibatkan oleh alam maupun perilaku manusia. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya curah hujan tinggi, pendangkalan sungai, drainase yang buruk, sampah dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri permasalahan banjir ini kerap kali menimbulkan kerugian bagi daerah yang terdampak olehnya.

Bencana Alam tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap alam itu sendiri tetapi juga kita sebagai makhluk hidup yang hidup didalamnya. Manusia dalam bentuk kelompok masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam dapat dikatakan sebagai korban bencana alam. Bencana alam dapat menimbulkan

kerentanan sosial bagi korban bencana. Untuk itu bantuan sosial perlu diberikan kepada korban bencana agar terhindar dari resiko sosial (Sebastian:2008).

Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, sudah seharusnya memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan sosial tersebut. Untuk menjalankan tugas pemerintahan itu khususnya pemerintahan Indonesia membentuk sebuah pihak berwenang khusus untuk menjalankan kewenangan pada bagian sosial ini. Agar bantuan sosial tadi dapat tersalurkan dengan tepat, efektif dan efisien.

Salah satunya Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang mana termasuk wilayah di Indonesia yang rawan terkena bencana alam. Dan banyak masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Untuk hal ini Pemerintah pusat menyerahkan tugas kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk penyaluran dana bantuan sosial sebagai korban bencana alam yang mana telah diatur PERMENSOS No.18 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pihak yang berwenang untuk menyalurkan dana bantuan bencana alam di Kota Padang adalah Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang merupakan salah satu kantor dinas yang berperan membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dinas Sosial ini diperlukannya pencairan anggaran dana bantuan bencana alam. Dalam hal ini pemerintah tentu telah menyiapkan suatu anggaran bencana alam yang telah dianggarkan sebelumnya yang

mana hal ini telah diatur dalam PERWAKO Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial. Pencairan anggaran dana bantuan sosial yang baik dan tepat sasaran sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, dan tepat sasaran. Untuk mencairkan dana bantuan sosial ini ada baiknya untuk mengetahui prosedur pencairan dana. Akan tetapi, jika pencairan dana tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, proses pencairan dana bisa saja berjalan secara tidak efektif dan efisien.

Salah satu bentuk pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan melalui pemulihan dan penguatan sosial secara stimulan atau bertahap. Pemulihan dan penguatan sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana dalam rangka mengembalikankeberfungsian sosialnya.

Mengingat pentingnya prosedur yang baik dan benar dalam pencairan dana bantuan sosial korban bencana alam maka penulis tertarik untuk ingin mengetahui prosedur dari pencairan dana bantuan sosial korban bencana alam yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Padang. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL STIMULAN PEMULIHAN DAN PENGUATAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA ALAM BANJIR PADA DINAS SOSIAL KOTA PADANG”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Jenis bantuan sosial apa saja yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Padang kepada korban bencana alam banjir?
2. Apa saja bentuk bantuan sosial stimulan pemulihan dan penguatan sosial untuk korban bencana alam banjir pada Dinas Sosial Kota Padang?
3. Bagaimana prosedur pencairan dana bantuan sosial stimulan pemulihan dan penguat sosial untuk korban bencana alam banjir pada Dinas Sosial Kota Padang?

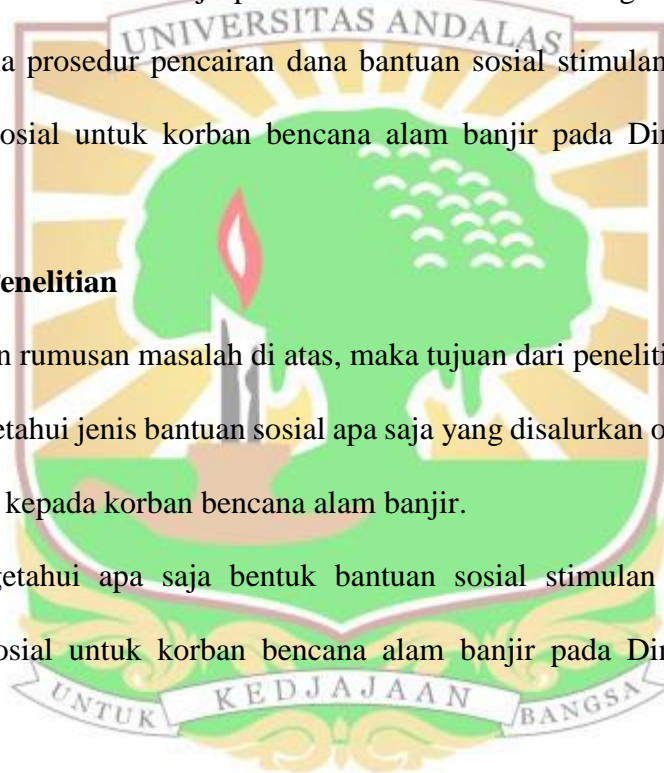
## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui jenis bantuan sosial apa saja yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Padang kepada korban bencana alam banjir.
- b. Untuk mengetahui apa saja bentuk bantuan sosial stimulan pemulihan dan penguatan sosial untuk korban bencana alam banjir pada Dinas Sosial Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencairan dana bantuan sosial stimulan pemulihan dan penguat sosial untuk korban bencana alam banjir pada Dinas Sosial Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis



Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur perpustakaan yang dapat dijadikan rujukan untuk menambah dan memperluas ilmu serta keterampilan mahasiswa/mahasiswi dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial Pemulihan dan Penguatan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Banjir Pada Dinas Sosial Kota Padang.

## 2. Bagi Penulis

Bagi Penulis kegiatan penelitian dan magang ini sebagai salah satu syarat melengkap dan menyelesaikan pendidikan Diploma III di Program Studi Perbankan dan Keuangan Universitas Andalas dan Juga nantinya dapat dikembangkan bagi penulis dalam meniti karier di masa mendatang. Mengasah dan menambah wawasan serta pengalaman bagi penulis. Penulis mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan mengenai Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial Pemulihan dan Penguatan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Banjir Pada Dinas Sosial Kota Padang. Penulis dapat melakukan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan yang terjadi dilapangan dalam kegiatan Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial Pemulihan dan Penguatan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Banjir Pada Dinas Sosial Kota Padang.

## 3. Bagi Instansi Pemerintah

- a. Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas sosial Kota Padang dimana tempat penulis melakukan kegiatan magang.
- c. Sebagai wujud partisipasi Dinas Sosial Kota Padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai prosedur

pencairan dana bantuan sosial korban bencana alam banjir pada Dinas sosial Kota Padang.

### **1.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dapat penulis jadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul pokok bahasan yang penulis jelaskan diatas, adapun metode yang akan penulis gunakan adalah:

a. **Study Kepustakaan (Library Research)**

Studi kepastakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis.

b. **Penelitian Lapangan (Field Research)**

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan/ badan yang menjadi objek study sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek.

c. **Metode Analisis**

Study ini untuk menganalisis teori yang telah diterima dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

### **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja, dan penulis memilih tempat instansi magang yaitu Dinas sosial

Kota Padang yang bertempat di Jl. Delima No.5, Ujung Gurun, Kec. Padang Baru,  
Kota Padang, Sumatera Barat. (0751) 21903.

## **1.7 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Magang, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab landasan teori ini yang membahas Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial Stimulan Penguatan dan Pemulihan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Banjir Pada Dinas Sosial Kota Padang.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab gambaran umum instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Dinas sosial Kota Padang yang terdiri dari: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, lokasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan ini membahas tentang Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial Stimulan Penguatan dan Pemulihan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Banjir Pada Dinas Sosial Kota Padang.



## **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis.

